

# PENGUKURAN DAN STRATEGI

FX. Sugiyanto

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

## **Abstract :**

*In a global world, nations compete to sustain and increase their standard of living. For this reason, competitiveness is key factor of nation to compete among them. There are many factors to measure nation competitiveness: economic performance, government efficiency, business efficiency and infrastructure. Each factor can breakdown to many criteria.*

*Another factor of level of country's competitiveness determinant is value system . As a Max Weber's study, economic development of nations were correlated with culture of their people. Consequently, nations do not compete with products and service alone, but also with education and value systems.*

*In Indonesian case, there are many problems with economic competitiveness.. Lack of macroeconomic policies, beareucratric regidity, bad governance management and bad corporate governance management are the major problems to improve economic competitiveness. Democratisation process will be a bridge to achieve high nation competitiveness. Maybe.*

## **Key words :**

global world – level of competitiveness – democratisation process

## **PENDAHULUAN**

**D**aya saing (*competitiveness*) telah menjadi satu kunci, baik bagi masyarakat suatu perekonomian maupun individu dalam suatu tatanan ekonomi lintas negara. Bukan hanya perusahaan yang melakukan restrukturisasi atau membentuk jaringan aliansi untuk dapat bersaing, tetapi juga pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan menarik investasi ke dalam. Dengan demikian, yang harus bersaing bukan hanya perusahaan, tetapi juga pemerintahan sebuah negara pun harus melakukannya. Karena itu pula, daya saing tersebut dapat dipandang dari dua perspektif yakni mikro perusahaan dan makro suatu perekonomian. Perbedaan perspektif ini tentunya mengharuskan adanya perbedaan dalam ukuran dan indikator yang digunakan untuk melihat daya saing tersebut. Selain itu, daya saing tersebut juga harus ditempatkan dalam konteks komperatif, dalam arti dia harus ditempatkan dalam konteksnya dengan perusahaan dan atau negara lain.

Sebagai suatu teori, daya saing telah cukup panjang dikembangkan oleh David Ricardo dengan teorinya "Keunggulan Komperatif". Daya saing adalah suatu konsep mekanisme untuk mempertimbangkan sekelompok indikator luar negeri yang menekankan pada kinerja relatif antar negara. Dalam perspektif makro, kemakmuran suatu negara; sebagai indikator kinerja suatu perekonomian tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan riil penduduknya (Lawton, 1999). Porter (1990) merumuskan daya saing tersebut sebagai kemakmuran ekonomi, dan hal ini sangat tergantung pada produktivitas penduduk suatu bangsa. Karena itu, produktivitas dipandang sebagai determinan utama jangka panjang bagi kenaikan standar hidup suatu bangsa. Sedang dalam perpektif mikro, indikator daya saing suatu perusahaan dilihat dari tingkat *harga relatif*. Tingkat harga relatif yang semakin rendah, menunjukkan tingkat daya saing perusahaan yang semakin tinggi. Pengertian relatif ini harus diartikan dalam kaitanya dengan berbagai atribut yang membentuk suatu macam produk, baik itu kualitas, desain, harga, kenyamanan dan atribut-aibut lainnya. Dengan demikian, esensi dari daya saing adalah biaya yang relatif rendah. Karena itu pula, esensi peningkatan daya saing adalah penurunan ongkos. Sementara negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kondisi dimana suatu negara mampu-menghasilkan dan menjual produk dan jasa di suatu pasar internasional yang bebas dan fair dan secara simultan dapat menciptakan pendapatan bagi masyarakatnya dalam jangka panjang (Stephane Garelli, 2002). Sedang Institute of Management Development yang selalu menerbitkan *World Competitiveness Yearbook* melihat daya saing tersebut dalam kontek hubungan antara lingkungan suatu negara dimana negara memainkan peranan kunci dengan proses penciptaan kesejahteraan. Karena itu, WCY memfokuskan pada hasil interaksi antara faktor-faktor kinerja ekonomi, Efisiensi Pemerintahan, Efisiensi Dunia Usaha dan Infrastruktur. (Stephane Garelli, 2002). Dengan mendasarkan pada empat faktor yang mencakup lebih 300 kriteria, WCY menganggap bahwa kinerja yang sehat dari dimensi-dimensi itu akan menciptakan daya saing nasional

yang berkelanjutan (*sustain world competitiveness*).

Suatu negara dalam memanage lingkungan untuk membangun daya saing mendasarkan pada empat dimensi fundamental daya saing; yang lebih dikenal dengan "teori Kubus". Empat dimensi tersebut adalah:

**(a) Atraktivitas – Agresivitas (Attractiveness – Aggressiveness).** Suatu bangsa mempunyai banyak variasi cara dalam hubungannya dengan dunia bisnis. Secara tradisional, daya saing dikaitkan dengan agresivitas suatu negara, misalnya melalui ekspor atau penanaman modal. Negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Jerman mengikuti strategi ini. Agresivitas biasanya akan menciptakan pendapatan bagi negara asal. Sementara beberapa negara seperti Singapura, Irlandia meningkatkan daya saing mereka melalui strategi atraktivitas dengan memberi insentif terhadap investasi langsung.

**(b) Proksimitas – Globalitas (Proximity – Globality).** Sistem ekonomi suatu negara secara umum tidaklah homogen. Dalam banyak kasus, suatu bangsa harus berhadapan dengan dua pilihan keadaan: perekonomian internal proteksionistik atau perekonomian global. Aktivitas perekonomian yang bersifat proksimitas akan cenderung proteksionistik dan berbiaya tinggi dan nilai tambahproduk akan banyak dinikmati oleh pengguna akhir. Sementara aktivitas perekonomian yang cenderung globalistik, akan cenderung kompetitif.

**(c) Kepemilikan Aset versus Proses (Assets vs Processes).** Ada banyak negara yang menjadi kaya karena kepemilikan aset-aset natural seperti tanah, dan sumber-sumber alam. Negara-negara seperti Brasilia, India bahkan juga Indonesia termasuk dalam kelompok ini. Namun ada banyak pula negara yang menjadi kaya karena melakukan proses transformasi walaupun miskin sumber daya alam. Singapura, Jepang dan Swiss termasuk kedalam kelompok negara ini. Pada umumnya negara yang mampu melakukan proses transformasi ini mempunyai daya saing yang lebih tinggi dari pada kelompok negara-negara yang mempunyai aset natural.

**(d) Resiko Individual versus Kohesivitas Sosial (Individual Risk vs Social Cohesiveness).** Kekuatan keempat yang dapat mengantarkan daya saing dari suatu negara adalah perbedaan sistem sosial

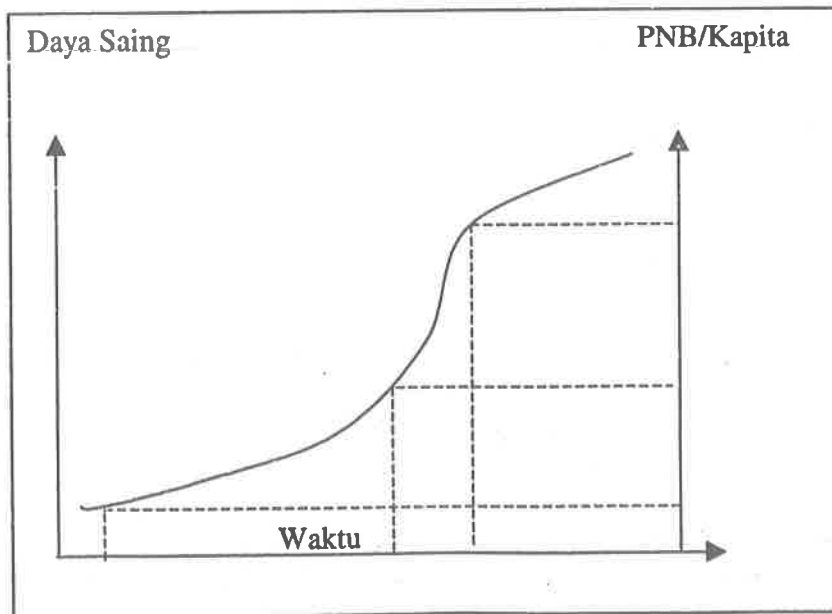
Ikini antara suatu sistem yang lebih menitikberatkan pada tanggung jawab individual dengan sistem yang bertumpu pada kohesivitas sosial. Negara-negara Anglo-Saxon adalah negara-negara dengan model yang lebih mendasarkan pada sistem yang menempatkan pertanggungjawaban individual, sehingga pendekatan sistem kesejahteraan menjadi sangat minimal. Sementara, negara-negara Continental adalah model negara-negara dengan sistem menitikberatkan pada konsensus sosial, sehingga sistem kesejahteraan sosial mempunyai tempat yang sangat strategis.

Dilihat dari esensinya tersebut, maka tidaklah bertentangan antara perspektif daya saing dalam arti mikro dengan daya saing dalam arti makro, walaupun indikator dan ukurannya berbeda. Dari segi teknis pun tidaklah beda, dan saling melengkapi. Daya saing juga bersifat dinamis. Semakin tinggi daya saing perekonomian suatu negara, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk negara tersebut. Demikian pula, semakin tinggi daya saing suatu perusahaan, kinerja perusahaan bersangkutan juga semakin baik. Hubungan antara daya saing dan kemakmuran tersebut ditunjukkan dalam gambar-1.

Mengapa sebuah bangsa mesti bersaing, tidak lain karena pasar dunia semakin terbuka. Sejarah dunia pun sudah mencatatkan dirinya mengalami kehancuran perekonomian pada tahun 1930-an ketika hubungan antar negara tunduk pada proteksionisme. Dalam kaitan untuk menjaga agar tidak mengulangi sejarah buruk tersebut, pada tahun 1944 diratifikasi Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) yang sekarang dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peranan perkembangan teknologi telah mempercepat proses liberalisasi perdagangan multilateral tersebut.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, perhatian terhadap daya saing tersebut sangat relevan, setidaknya jika daya saing itu dikaitkan dengan dua hal berikut ini. *Pertama* berkaitan dengan arus liberalisasi perdagangan dunia. Ratifikasi persetujuan perdagangan multilateral yang tertuang dalam World Trade Organization (WTO) dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia pun harus taat terhadap aturan-aturan didalamnya. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah bahwa semua negara harus secara bertahap melakukan pengikisan terhadap proteksi-proteksi

Gambar-1  
PERKEMBANGAN DAYA SAING DAN PENDAPATAN PER KAPITA



perdagangan antar negara. *Kedua*, kondisi internal industri Indonesia secara umum masih tidak efisien. Akibatnya, jika harus memasuki tatanan perdagangan bebas, sangat mungkin perusahaan-perusahaan Indonesia di pasar internasional akan kalah bersaing.

### Determinan Daya Saing

Untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing, suatu bangsa haruslah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam bentuk biaya yang lebih rendah (*cost leadership*) atau membangun keunikan melalui deferensiasi produk (*product differentiation*) (Porter, 1990). Perlu dipahami lebih dulu, perilaku (*nature*) kompetisi dan sumber-sumber keunggulan kompetitif akan berbeda antar industri dan bahkan antar segmen industri. Disamping itu, kompetitor global sering melakukan aktivitas dalam rantai nilai di luar negara mereka. Ini berarti merekapun telah mengubah karakter mereka yang tidak lagi mendasarkan pada keunggulan dalam "home base"-nya. Kompetitor Global biasanya juga telah melakukan dan secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan inovasi, dan secara agresif menciptakan pasar-pasar baru.

Mengapa sebuah bangsa dapat mencapai sukses internasional? Hal tersebut terletak pada empat faktor utama yang mempengaruhi lingkungan dimana industri tersebut bersaing (Gambar-2)

1. *Faktor Produksi*. Keadaan ketersediaan faktor produksi seperti SDA, keadaan tenaga kerja,

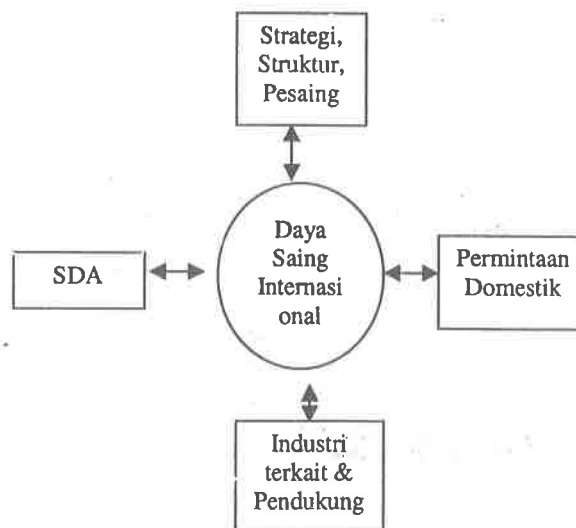
pengetahuan dan teknologi, modal, infrastruktur, struktur industri faktor produksi akan menentukan daya tawar pemasok faktor produksi dan daya saing suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat ketersediaan faktor produksi tersebut, maka akan semakin tinggi pula tingkat daya saing suatu industri.

2. *Permintaan Domestik*. Tiga atribut permintaan domestik mempunyai pengaruh signifikan terhadap daya saing yaitu *komposisi permintaan atau perilaku pembeli, skala dan pola pertumbuhan permintaan domestik*, serta mekanisme transmisi permintaan dari dalam ke luar negeri atau internasionalisasi permintaan domestik.

3. *Dukungan industri terkait*. Keberadaan industri pendukung atau yang berhubungan; baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri akan mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu industri.

4. *Strategi perusahaan, struktur industri atau pasar dan pesaing*. Kondisi bagaimana perusahaan tersebut dilahirkan, diorganisasikan dan perilaku pesaing domestik akan menentukan daya saing internasional. Tujuan, strategi, cara mengorganisasikan perusahaan sangat bervariasi di antar pesaing baik di dalam negeri maupun di negara-negara pesaing. Cara mengelola perusahaan pun sangat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan (*circumstances*). Karena itu tidak ada satu pun sistem manajemen yang secara universal tepat guna (*appropriate*)

Gambar 2  
ASPEK DETERMINAN DAYA SAING



**Pengukuran**

Bagaimana dan dimensi apa yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing? Ada banyak faktor yang meliputi banyak kriteria untuk menentukan daya saing suatu perekonomian. Secara umum faktor-faktor meliputi Kinerja Ekonomi, Efisiensi

Pemerintahan, Efisiensi Dunia Usaha dan Infra Struktur. WCY secara lebih rinci mengukur daya saing dengan memperhitungkan faktor-faktor berikut (lihat Tabel 1).

Komisi Daya Saing Presiden AS menggunakan empat indikator untuk mengukur daya saing

**Tabel-1**  
**FAKTOR , ASPEK DAN KRITERIA DAYA SAING PEREKONOMIAN**

No	Faktor	Aspek	Jumlah Kriteria	Cakupan
1	Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian Domestik</li> <li>• Perdagangan Internasional</li> <li>• Investasi Internasional</li> <li>• Kesempatan Kerja</li> <li>• Tk. Harga</li> </ul>	74 kriteria	Evaluasi kondisi ekonomi makro domestik
2	Efisiensi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan Pemerintah</li> <li>• Keljakan Fiskal</li> <li>• Kerangka Kelembagaan</li> <li>• Peraturan Dunia Usaha</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>	84 Kriteria	Seberapa jauh kebijakan pemerintah kondusif menciptakan daya saing
3	Efisiensi Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas</li> <li>• Pasar Kerja</li> <li>• Keuangan</li> <li>• Praktik Manajemen</li> <li>• Impak globalisasi</li> </ul>	66 kriteria	Seberapa jauh perusahaan bekerja secara inovatif, menguntungkan dan mempunyai tanggung jawab thd stakeholder
4	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur dasar</li> <li>• Teknologi</li> <li>• Ilmu Pengetahuan</li> <li>• Kesehatan dan Lingkungan</li> <li>• Sistem nilai</li> </ul>	90 kriteria	Seberapa besar iptek dan SDM mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha

Sumber: IMD-World Competitiveness Yearbook, Mei 2002

perekonomian yaitu: produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan upah riil, tingkat pengembalian modal riil dan posisi dalam perdagangan dunia dan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum: WEF) 8 (delapan) faktor untuk menghitung daya saing (lihat Tabel-2)

Dari studi yang dilakukan Lawton (1999) dengan

### Sistem Nilai

Sistem nilai (value system) suatu negara merupakan faktor lain yang akan sangat mempengaruhi daya saing suatu negara. Max Weber, seorang filosof Jerman, menunjukkan secara jelas hubungan antara budaya dan pembangunan ekonomi dalam bukunya "The Protestant Ethic, Protestaniser

Tabel 2  
FAKTOR DAYA SAING MENURUT WEF

No	Faktor	Variabel
1	Keterbukaan	Peningkatan Ekspor, Kebijakan nilai tukar, asesabilitas investasi LN
2	Kebijakan Pemerintah	Defisit anggaran, tingkat tabungan masyarakat, tingkat pajak
3	Keuangan	Tingkat persaingan pasar uang, credit rating
4	Infrastruktur	Jumlah dan kualitas infrastruktur
5	Teknologi	Tingkat komputersasi, kualitas R & D
6	Manajemen	Pemasaran, training staf, kualitas sistem pengawasan keuangan internal
7	Tenaga Kerja	Biaya tenaga kerja relatif, tingkat pendidikan dasar, skill, pajak tenaga kerja
8	Kelembagaan	Kualitas Lembaga Hukum dan pratek pelaksanaan Hukum, luasan korupsi

Sumber: Lawton, EBJ:1999

menggunakan variable daya saing WEF dan IMD Singapura merupakan negara yang mempunyai daya saing paling tinggi menurut pendekatan WEF dan AS pada urutan kedua, sedang menurut IMD, AS yang paling tinggi dan Singapura pada urutan kedua. Menurut WEF; Indonesia ada pada urutan ke 37, sedang menurut IMD tidak masuk ke dalam urutan empat puluh negara dengan daya saing tertinggi.

Dalam meningkatkan daya saing industri, Eropa Barat menempuh kebijakan penyesuaian structural. Tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan penyesuaian struktural tersebut adalah untuk mempercepat penyesuaian struktur industri terhadap perubahan yang berkembang, mengembangkan UKM, peningkatan inovasi dan riset.

Di Inggris, peningkatan daya saing dilakukan dengan menempuh kebijakan berikut: stabilisasi lingkungan ekonomi makro, deregulasi dan kebijakan kompetisi aktif, kebijakan pajak yang mendorong investasi dan usaha, skema training dan pendidikan, mendorong pasar kerja yang fleksibel, partnership antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong inovasi, membantu pemodal untuk UKM.

and Spirit of Capitalism". Sistem nilai ini akan cenderung berevolusi. Evolusi tersebut akan melalui tahapan berikut:

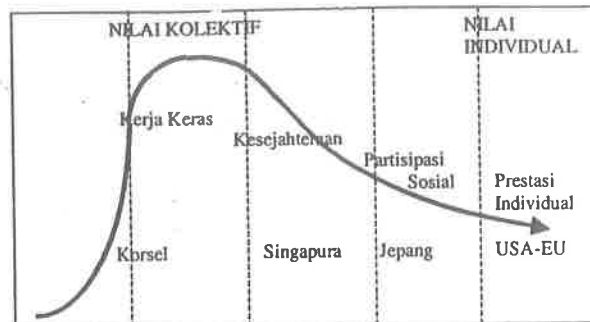
(1) *Kerja keras* : masyarakat akan secara total mengabdikan diri untuk tujuan negara dan akan kerja keras dengan mencurahkan jam kerja yang lebih banyak. Contoh dalam hal ini adalah Korea Selatan

(2) *Peningkatan kesejahteraan*: pada tahap ini masyarakat tetap akan bekerja keras, dan akan memberi perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan. Contoh dalam hal ini adalah Singapura

(3) *Partisipasi Sosial*: pada tahap ini masyarakat sudah kurang tertarik untuk bekerja keras, dan akan mulai lebih banyak akan terlibat pada kepentingan sosial. Contoh dalam hal ini adalah Jepang

(4) *Prestasi Individual*: pada tahapan ini masyarakat lebih tertarik untuk lebih membangun kepentingan individualnya dari pada kepentingan sosialnya. USA dan Uni Eropa saat ini merupakan contoh masyarakat pada tahapan ini.

Gambar 3  
PERBANDINGAN EVOLUSI SISTEM NILAI BEBERAPA NEGARA



Sumber : IMD-World Competitiveness YearBook : Mei 2002

### Daya Saing Ekonomi Indonesia: Sebuah Perjalanan Panjang

Sebagaimana sudah dibahas pada bagian terdahulu, daya saing perekonomian dan industri dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dalam perspektif mikro, faktor eksternal tersebut adalah semua variabel lingkungan perusahaan berada diluar kemampuan perusahaan atau industri untuk mengendalikannya. Dalam perspektif makro, faktor eksternal tersebut adalah variabel-variabel ekonomi internasional yang sifatnya tidak dapat dikendalikan. Pendekatan analisis terhadap daya saing ekonomi Indonesia yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan WEF dengan beberapa variabel tambahan. Variabel-variabel tersebut mencakup instrumen kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan restrukturisasi industri, indikator sosial seperti pendidikan, upah buruh dan demografi seperti struktur usia, angkatan kerja dan pengangguran, serta variabel politik dan hukum.

#### a. Kebijakan moneter.

Instrumen-instrumen moneter yang variable moneter yang akan dibahas dalam hal ini mencakup kinerja tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar.

**Tingkat bunga.** Tingkat bunga merupakan *cost of fund* dari investasi yang dibiayai oleh dunia perbankan. Fleksibilitas investasi terhadap tingkat bunga menunjukkan tingkat responsibilitas investasi atau sektor riil terhadap perubahan tingkat bunga atau sektor moneter. Sejak kebijakan Moneter 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) Bank Sentral tidak lagi mengatur tingkat bunga bank umum. Hal ini mempunyai implikasi bahwa tingkat bunga akan ditentukan oleh interaksi

yang terjadi di pasar uang. Liberalisasi pasar uang tersebut akan mempunyai dampak positif terhadap daya saing seandainya dunia usaha di sektor riil responsif terhadap tingkat bunga. Dengan demikian, dilihat secara institusional kebijakan liberalisasi tersebut merupakan bentuk upaya peningkatan daya saing. Sayangnya, sektor riil di Indonesia tidak responsif terhadap perubahan di sektor moneter (Timothy, 1994. Sugiyanto, 1999). Karena sifatnya yang tidak responsif ini, maka upaya peningkatan daya saing melalui instrumen tingkat bunga menjadi tidak efektif.

**Inflasi.** Dari sisi konsumen, inflasi merupakan faktor pengurang daya beli. Dari sisi produsen dan penjual, inflasi akan menambah biaya; baik biaya produksi maupun biaya distribusi. Inflasi yang meningkat dengan tajam dan pada tingkat yang tinggi jelas menjadi factor penghalang peningkatan daya saing. Terhadap permintaan domestik, inflasi akan cenderung menurunkan permintaan baik dalam size-nya maupun pola permintaannya. Karena inflasi juga terjadi sebagai akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi; juga karena kurangnya penawaran, maka inflasi akan menjadi beban dalam bentuk kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya juga akan meningkatkan harga relatif produk dan sekaligus dapat menurunkan keuntungan produsen. Kenaikan harga relatif ini akan menurunkan daya saing. Dibanding beberapa negara lain, inflasi di Indonesia relatif masih cukup tinggi (*Word Economic Outlook*, May 2001)

**Nilai Tukar.** Masalah terbesar berkaitan dengan nilai tukar Rupiah adalah ketidakstabilan. Perusahaan memerlukan perencanaan usaha yang "expectable".

Nilai tukar yang *volatile* menjadikan perusahaan tidak mampu melakukan perencanaan dengan mantap karena setiap saat perencanaan tersebut dapat berubah. Jadi nilai tukar yang berubah-ubah bisa merusak pasar. Apresiasi dollar yang mencapai lebih dari 300 persen dalam tiga tahun terakhir ini semestinya dapat dimanfaatkan bagi kenaikan ekspor. Tetapi hal itu tidak terjadi, terutama bagi eksportir pada industri pengolahan. Sedang eksportir produk-produk primer dapat menikmati peluang tersebut. Meningkatnya ekspor tersebut bukan karena daya saing meningkat, melainkan karena perubahan nilai tukar yang cukup besar. Pada industri pengolahan, yang sebagian besar atau sebagian inputnya masih merupakan komponen impor, kenaikan nilai tukar dollar justru meningkatkan beban ongkos. Dan hal ini menjadikan produk-produk manufaktur tersebut menjadi relatif mahal. Sistem nilai tukar fleksibel akan menjadi factor pendorong meningkatnya daya saing seandainya nilai tukar tersebut tidak *volatile*. Keuntungan lain dengan menerapkan system nilai tukar mengambang adalah karena sebagian negara partner dagang Indonesia juga menerapkan system nilai tukar mengambang.

Berkaitan dengan instrumen moneter ini, variabel kunci untuk meningkatkan daya saing adalah stabilitas kurs dan tingkat kurs Rupiah. Kurs yang stabil akan cenderung tidak mendorong pelarian modal. Dengan kurs yang stabil, Bank Sentral secara bertahap akan dapat menurunkan suku bunga. Disisi lain jika kurs rupiah stabil, inflasi dapat dikendalikan lewat dua jalur, yakni jalur moneter dan jalur distribusi dan penawaran.

#### b. Kebijakan Fiskal

Dua instrumen mendasar dalam peningkatan daya saing melalui kebijakan fiskal; yakni penurunan defisit anggaran dan penurunan tingkat pajak atau insentif pajak yang lain. Tetapi, instrumen ini bersifat dikotomis. Defisit anggaran mempunyai dua implikasi yang berlawanan tergantung bagaimana defisit tersebut dibiayai. Jika dibiayai dengan mencetak Rupiah, maka inflasi akan terjadi. Sebaliknya jika defisit ditutup dengan menekan pengeluaran, permintaan akan berkurang. Atau, jika defisit tersebut ditutup dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi, akibatnya akan lebih parah lagi, yakni penurunan

permintaan dan sekaligus inflasi akan naik. Dalam kasus Indonesia, ada langkah yang lebih aman dan sekaligus meningkatkan daya saing yakni menjual aset-aset pemerintah yang ada di BPPN dan menjual BUMN. Insentif pajak akan meningkatkan daya saing. Akan tetapi dalam kasus Indonesia saat ini, hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat justru pemerintah sedang dalam ancaman defisit yang semakin besar.

#### c. Restrukturisasi Industri

Strategi substitusi impor yang dikembangkan Indonesia sejak awal Repelita I yang disertai proteksi tinggi dan tidak menyertakan *time horizon* yang jelas telah menyebabkan industri yang dikembangkan Indonesia rentan terhadap persaingan. Di samping itu, strategi pertumbuhan dengan konsep *trickle down effect* yang mengalami kegagalan telah menyebabkan struktur industri Indonesia cenderung oligopolistik. Strukturisasi industri kearah oligopolistik dan monopolistik mendapat momentum kuat ketika secara sosiologis pertumbuhan industri tersebut dipacu oleh "kroniisme" dalam bisnis dan oligarki dalam kekuasaan dan politik. Strukturisasi industri yang oligopolistik tersebut ditandai oleh konsentrasi yang tinggi oleh empat perusahaan terbesar (CR-4) pada industri manufaktur, perdagangan dan perbankan. Memang, sejak tahun 1975 CR-4 di atas 0,75 mulai menurun dari 38,2 persen menjadi 21,9 persen pada tahun 1990 tetapi meningkat lagi menjadi 29,1 persen pada tahun 1993 (Bird, 1996). Industri-industri yang oligopolistik secara alamiah mempunyai karakteristik tidak dapat bekerja secara efisien, apalagi kalau industri tersebut dilahirkan dari satu proses yang proteksionistik yang dilandaskan pada kepentingan bercokol (*vested interest*).

Kelemahan struktural lain dalam industri Indonesia adalah banyaknya industri *footloose*, sehingga bebas kemana saja untuk dapat memproduksi. Apalagi jika industri tersebut tidak menggunakan basis inputnya di Indonesia. Industri kimia termasuk dalam kategori ini. Industri demikian akan mudah pindah ke negara lain jika tidak mendapat insentif untuk menjalankan operasinya di Indonesia. Banyaknya perusahaan yang ambruk ketika didera krisis ekonomi menunjukkan cukup banyaknya industri *footloose* tersebut.



#### d. Kualitas Tenaga Kerja dan Struktur Usia Muda

Upah rendah sudah diragukan sebagai faktor keunggulan komperatif industri Indonesia. Jika upah merupakan pencerminan dari produktivitas tenaga kerja, maka upah yang rendah bisa dipandang sebagai cerminan produktivitas yang rendah. Ketika industri tekstil Indonesia mulai tumbuh, tingkat upah rendah di Indonesia dipandang sebagai keunggulan komperatif bersamaan melubernya (*spill over*) industri dan teknologi tekstil padat karya Korea yang sudah usang di negaranya. Saat ini, ketika India, Bangladesh dan negara-negara Asia Selatan telah muncul sebagai negara penghasil tekstil yang potensial dan bersamaan dengan tuntutan buruh internasional untuk meningkatkan harkat hidup buruh, upah rendah bukan lagi sebagai penjamin keunggulan daya saing, tetapi justru sebaliknya.

Thee Kian Wie (Kian Wie: 2000) menyorot tiga aspek rendahnya daya saing produk industri Indonesia. Tiga aspek tersebut adalah (1) sistem insentif yang tidak mendukung: kebijakan makro ekonomi yang tidak stabil dan sehat, regim perdagangan, kebijakan persaingan dalam negeri yang tidak sehat, (2) kapabilitas yang tidak memadai: mencakup investasi SDM, prasarana dan teknologi, (3) kelembagaan.

Rendahnya skill pekerja selain tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah juga tercermin dari usia pekerja yang cenderung mengelompok pada usia muda. Kenyataan ini menggambarkan adanya keterpaksaan pekerja untuk bekerja. Dengan struktur pendidikan pekerja yang relatif rendah, dan struktur usia pekerja adalah pekerja usia muda, maka cukup masuk akal jika tingkat upah relatif rendah.

#### e. Tingkat Penganggur

Persoalan terbesar dalam perekonomian Indonesia bukan tingkat pengangguran, melainkan tingkat setengah menganggur yang sangat tinggi. Benar bahwa kenaikan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika ekonomi Indonesia dilanda krisis, meningkatkan jumlah penganggur. Tetapi, tingkat setengah menganggur; yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 45 persen. Tekanan terhadap lapangan

kerja yang berat inilah yang akan menjadikan kenaikan tingkat upah terhambat.

#### f. Kelembagaan

Aspek penegakan hukum merupakan salah satu titik lemah dalam upaya meningkatkan daya saing internasional. Kegagalan dalam melaksanakan hukum secara adil dan terbuka, menjadi sebab gagalnya menuju pada pengelolaan ekonomi dan bisnis yang bersih dan jujur (*good corporate governance*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Praktek bisnis kotor dan pemerintahan yang korup telah menjadikan Indonesia sebagai negara kleptokratif (Suglyanto, 2000). Ketidakpastian hukum menjadi faktor penentu lemahnya daya saing ekonomi Indonesia.

Birokrasi yang korup dan tidak efisien merupakan faktor kelembagaan lain yang menjadi sebab lemahnya daya saing ekonomi Indonesia. Soal tingkat korupsi ini sudah menjadi lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Dan dalam hal ini, Indonesia telah masuk pada tiga besar negara terkorup di dunia.

#### Memecah Lingkaran Setan

Menurut IMD World Competitiveness Mei 2002, posisi Indonesia ada pada urutan 47. Posisi ini sudah lebih baik dibanding posisi tahun 2001 yang berada pada urutan ke 49. Namun, diantara negara-negara ASEAN dan juga negara-negara Asia yang terserang krisis posisi Indonesia tetap yang terbawah. Pada tahun 2002 tersebut Singapura ada urutan ke-5, Malaysia urutan ke-26, Korsel urutan ke-27, Thailand urutan ke-34 dan Philipina urutan ke -40.

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia sudah bagaikan lingkaran setan yang sangat sulit dipecahkan, kecuali dengan usaha maha besar (*big push strategy*). Proses yang diyakini akan membawa berkah pemecahan untuk mengatasi lemahnya daya saing tersebut adalah proses demokratisasi ekonomi dan politik. Demokratisasi ekonomi, menempatkan asas keadilan (*justice*) sebagai pengatur mekanisme perekonomian. Dalam mekanisme keadilan, pasar berperan sebagai pengatur sedang pemerintah berperan mengambil porsi dari kegagalan fungsi pasar dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja secara *fair*. Peran politik adalah mengatur kekuasaan sehingga keadilan tersebut dapat dicapai.

## DAFTAR BACAAN

---

- Bird, Kelly.1996., "Survey of Recent Development". Bulletin of Indonesian Economic Studies, Australian National University
- Garelli; Stephane, 2002., "IMD World Competitiveness Yearbook", May 2002, <http://www.imd.org>
- IMF, 2001., "World Economic Outlook" , May
- Lawton, Thomas C, 1999., "Evaluating European Competitiveness: Measurements and Model for a Successful Business Environment", European Business Journal: 195-205
- Michael E. Porter.1990, The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. The Third Avenue New York
- Sugiyanto, 1999., "Dua Tahun Sistem Nilai Tukar Mengambang". Media Ekonomi & Bisnis, FE Undip
- Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". Media Ekonomi & Bisnis FE Undip
- Thee Kian Wie, 2000., "Rising Indonesia's Industrial Competitiveness", Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol.48 No 1.